



# Kepanikan Moral dan *Politics of Moral* di Sumatera Barat

Yayuk Lestari

Graduate School of International Development, Nagoya University, Nagoya

email: [lestari.yayuk.b9@s.mail.nagoya-u.ac.jp](mailto:lestari.yayuk.b9@s.mail.nagoya-u.ac.jp)

**Abstract.** This paper examined the discourse surrounding morality and politics. Taking the setting in West Sumatra, this paper intended to explore how local politicians used the issue of moral politics by spreading fear without solid evidence. The purpose of this article was to look at the intersection between morality and politics from the perspective of the sociological framework of "moral panics", where the authorities, especially the government and religious institutions, were still the holders of authority to control the moral standards of society. Based on qualitative study, the article showed that using the basis of adat and religion, the government negates LGBT groups for political purposes to gain mass support.

**Keywords:** Moral Panics, Politics of Moral, Authority, LGBT, West Sumatera

## A. PENDAHULUAN

Di tengah permasalahan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat, aspek moralitas menjadi wacana yang mendominasi di ruang publik. Bahkan menurut Parker (2013) tidak ada bukti konkrit yang mendukung kekhawatiran pemerintah akan degradasi moral di kalangan anak muda. Namun, moralitas tetap menjadi isu dominan di ruang publik. Salah satu isu yang mendominasi ruang publik yakni politik moral terutama isu anti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Mendekati pilkada isu LGBT sering disinggung oleh politisi. Isu ini mendapatkan sorotan utama dalam wacana moralitas meskipun daftar dosa-dosa penyakit masyarakat lain seperti mabuk, prostitusi dan narkoba, ini adalah *rising star* dan aktor utama agenda politik moral. Bagaimana peranan media membentuk dan mensuplai informasi tentang LGBT?

Sementara itu, kelompok Islam konservatif di Sumatera Barat mendorong para politisi untuk mengangkat isu moralitas ke ranah publik. Dukungan politisi lokal merupakan konsekuensi logis dari kuatnya Islam di Sumatera Barat. Didukung oleh politisi dan ulama, pemerintah daerah menerapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan moralitas politik. Dari perspektif kerakyatan, politik moral diperlukan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan kemudian di Sumatera Barat. Menurut Taggart (2000) ini merupakan upaya kerakyatan untuk mengkonstruksi identitas sebagai kesadaran tentang siapa yang bukan bagian dari kita daripada siapa kita. Politik moral melalui Perda bernuansa Syariah di Sumatera Barat memberikan peluang untuk mengecualikan kelompok yang dianggap berbeda secara moral.

Otoritas, seperti wakil gubernur Sumatera Barat, sering menggunakan ABS SBK (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) sebagai dasar penolakan kehadiran LGBT di Sumatera Barat karena tidak sesuai dengan identitas Minangkabau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengatakan, LGBT tidak sesuai dengan adat budaya dan agama apalagi norma Minangkabau yang berlandaskan ABS SBK. Sedangkan akademisi seperti Hamayotsu (2013) kuatnya kelompok konservatif tidak diimbangi dengan kelompok liberal, pergeseran demografi (Mietzne & Muhtadi, 2018). Menguatnya isu moralitas bukan hanya karena kelompok Islam yang menguat, namun isu moralitas menjadi isu bersama kaum agama dan adat yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan bersama. Moralitas yang diatur negara berdampak pada identitas pada individu, keluarga, kelembagaan, dan tingkat nasional. Praktik ini banyak ditemukan di negara-negara Asia Tenggara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan memaksa orang untuk membangun diri mereka sebagai warga negara yang baik (Hoon, C. Y, 2004).

Tujuan dari artikel ini ingin melihat interseksi antara moralitas dan politik dalam perspektif kerangka sosiologis *moral panics*, dimana pihak berwenang, terutama pemerintah dan institusi agama masih menjadi pemegang otoritas mengontrol standar moralitas masyarakat. Dengan menggunakan landasan adat dan agama, pemerintah mengabaikan kelompok LGBT demi kepentingan politik untuk menggalang dukungan massa. Belum ada tulisan tentang hal ini.

## B. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara tatap muka dan *online*, dokumentasi dikumpulkan terutama dari media massa cetak, online dan juga media sosial. Pengambilan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Peneliti melakukan wawancara dengan pemuka adat, pemuka agama dan tokoh politik dan juga masyarakat biasa untuk mendapatkan data tentang politik moral.

## C. STUDI LITERATUR

Dalam bukunya *Folk devils and moral panics; The creation of the Mods and Rockers*, Cohen (2011) menggunakan term *moral panic* untuk merujuk kepada tulisan di media massa Inggris pada tahun 1960-an yang menceritakan perbuatan menyimpang pemuda Inggris. Stigma menyimpang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah, institusi agama, dan media. Berbeda yang diungkapkan Cohen (2011) dan Parker (2009), anak muda yang menjadi obyek *moral panics* di Sumatera Barat turut memberikan persetujuan dan berkomitmen terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Mereka tidak memandang sebagai obyek dari kepanikan moral, hal ini bisa dimengerti dari bagaimana mereka di satu sisi menyetujui konsep dosa zina dan permasalahan di dalamnya, namun tidak melihat diri mereka sebagai bagian dari "ancaman". Kesepakatan antara obyek kepanikan moral dan pihak berwenang ini terjadi karena remaja perempuan menyadari perlunya memegang nilai agama dan budaya.

Parker (2009) juga mengamati bagaimana peran pemerintah yang besar untuk mengatur moralitas terutama lewat Undang-Undang Pornografi yang disahkan tahun 2008. Dengan adanya Undang undang ini diharapkan mampu melindungi dan mencegah pengaruh negatif luar. Parker menilai apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan seksualitas selalu menjadi wacana moral dan publik, dan pihak otoritas mengambil jalan dalam bentuk larangan dan proteksionis. Dalam perjalanan politik terutama pasca reformasi seringkali moralitas menjadi bahan gorengan oleh para politisi, terutama dengan menampilkan ketakutan-ketakutan akan bahaya AIDS, LGBT dan westernisasi.

Kitley (2008) kemudian menjelaskan mengapa Indonesia memandang penting moralitas, terutama di era pasca reformasi. Kitley berpendapat bahwa kebebasan dan demokrasi yang muncul setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kaum konservatif Muslim takut akan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali yang disebabkan oleh westernisasi dan globalisasi. Salah satu contoh kebebasan ala Barat yang ditakuti adalah konten pornografi di majalah Playboy, sebuah franchise majalah dewasa dari Amerika. Konservatif berpendapat bahwa konten di Playboy berbahaya jika dilihat oleh anak di bawah umur karena sulit untuk dipantau dan didistribusikan di Indonesia. Kehadiran LGBT, pornografi dan seks bebas menimbulkan kepanikan moral. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang tua yang membujuk anaknya masuk ke Pendidikan Agama Islam dan ingin mengenalkan agamanya sejak dini.

Selain pemerintah, media juga bertanggung jawab dalam melakukan *framing* kepanikan moral. Salah satu penelitian tentang bagaimana media juga memberikan kontribusi tentang gambaran kehidupan LGBT dilakukan oleh Listiorini, D., Asteria, D., Sarwono, B., (2019) memperlihatkan peran media massa memframing LGBT sebagai tindakan *immoral* dan devian yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Selain media, institusi formal lainnya seperti institusi keagamaan dan pemerintah turut berkontribusi memberikan label menyimpang. Tindakan yang dianggap menyimpang belum bisa diterima karena sesuatu yang baru atau sesuatu yang sudah ada tapi sudah lama menghilang.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Bencana dan Moralitas

Wacana hubungan maksiat dengan bencana semakin menguat pasca bencana tsunami di Aceh 26 Desember 2004. Bencana tsunami di Aceh menyebabkan Provinsi Aceh hancur lebur dan memakan korban lebih dari 100 ribu jiwa. Berita tentang tsunami disebarkan secara masif di televisi nasional dan media nasional. Dalam setiap kejadian bencana terutama berdampak banyak orang tewas, perdebatan apakah bencana disebabkan oleh hukuman Tuhan kepada manusia karena sudah meninggalkan ajaran agama, para pemimpin agama menyuarakan hubungan langsung antara bencana alam dan dosa manusia.

Cerita yang beredar bahwa pada tanggal 25 Desember 2004 ada pesta di dekat kuburan Syekh Abdurrauf Singkil- seorang ulama Aceh. Di pesta tersebut, orang-orang meminum alkohol dan melakukan perbuatan asusila (Adiyoso, W & Kanegae, H., 2013). Perbuatan *immoral* inilah yang dipercayai menjadi penyebab kemarahan Tuhan. Media massa juga banyak menampilkan isu sensasional hubungan antara

bencana dengan moralitas yang terjadi sebelum tsunami. Kejadian tsunami di Aceh juga menimbulkan kepanikan di masyarakat Sumatera Barat. Beberapa penelitian sudah mengindikasikan potensi gempa dan tsunami akan terjadi di Sumatera Barat. Secara geografis, Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan berada pada pertemuan dua lempeng benua besar yakni Eurasia dan Indo-Australia.

Diskursus tentang imoralitas sebagai pengundang bencana inilah yang mudah kita temui di perbincangan dan gosip di warung-warung ketika hendak membeli sarapan atau bahan makanan. Salah seorang penduduk Kota Padang, Tika, menceritakan dia sering menjumpai cerita tentang kaitan antara gempa yang terjadi di Kota Padang dengan kemaksiatan yang terjadi di Sumatera Barat. Cerita yang berbalut sensasional dan mudah dicerna tampaknya lebih diterima dan dekat dengan kehidupan masyarakat dibandingkan penjelasan ilmiah yang relatif lebih sulit untuk dipahami oleh masyarakat biasa. Mereka mendengarkan dari ulama di Masjid atau membaca di media massa. Media percakapan baru seperti *Whatsapp* juga membantu penyebaran informasi kaitan antara bencana dan maksiat. Santana, seorang lesbian dari kota di Sumatera Barat sering mendapatkan pesan di *Whatsapp* grup keluarga:

*“Di grup keluarga besar sering sih itu biasanya dari tante tante atau om yang forward pesan berkali kali. Ada yg bilang lgbt membawa bencana penyebab banjir”*

Selain cerita lewat dari mulut ke mulut dan juga dari media massa, otoritas menyebarkan dan meneguhkan pesan relevansi antara maksiat dan bencana. Salah satunya postingan dari Humas Pemerintah Kota Padang, lewat Walikota Mahyeldi yang mengingatkan untuk perbuatan maksiat bisa mengundang terjadinya bencana.



Gambar 1. Maksiat Dalang Bencana  
Sumber: Facebook Humas Kota Padang (2019)

Wacana bahwa maksiat adalah sumber bencana alam sering diulang-ulang oleh para politisi. Politisi Sumbar misalnya, Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Anggota DPR RI Andre Rosiade, sering membuang pernyataan maksiat agar Sumbar terhindar dari bencana. Pernyataan ini sering kali diucapkan dan semakin gencar ketika mendekati *local election* untuk tahun 2020 dimana Andre Rosiade dan Nasrul Abit berencana mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Barat. Kecaman ditemukan pada saat menjelang Pilkada, terutama di tahun 2018-2020.

Dalam beberapa kesempatan Nasrul Abit mengungkapkan data pelaku LGBT di Sumbar terbanyak di Indonesia dengan angka 18000 orang. Ia mengungkapkan keterkejutannya dan mengaitkan perilaku LGBT terhadap resiko penularan HIV/AIDS. Lebih jauh Nasrul Abit menolak LGBT karena tidak sesuai dengan budaya Minangkabau. Narasi maksiat dan bencana menurut juga dipaparkan oleh Wodak (2015), kaum LGBT dan perbuatan asusila dijadikan kambing hitam karena kondisi buruk yang menimpa kaum LGBT.

Menguatnya politik moral pasca desentralisasi diberlakukan juga dikemukakan oleh Simon (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi mendorong penguatan politik moral di Indonesia, terutama Sumatera Barat. Desentralisasi telah membawa perubahan pada batas-batas sistem sosial dan politik di Sumatera Barat. Perubahan sistem politik ke sistem pemilihan langsung membuka peluang patronase antara elit lokal dan tokoh masyarakat dalam suatu komunitas; Hal ini menimbulkan pragmatisme publik yang menganggap politik hanya permainan elit. Revitalisasi adat juga membawa revitalisasi keagamaan sebagai paket yang mengikuti filosofi masyarakat Minang, bahwa adat berdasarkan agama dan agama berdasarkan adat.

Menurut Hadis (2018), adat lokal sebagai idiom budaya, pemersatu interpretasi agama berbeda. Mereka yang mendukung aturan adat Minangkabau juga menggunakan syariah untuk melegitimasi pandangan mereka. Solok merupakan pelopor dalam mengeluarkan peraturan bernuansa syariah di provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan peraturan tentang membaca dan menulis Alquran pada tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2002 peraturan wanita memakai pakaian muslim (hijab). Setelah Solok mengeluarkan peraturan daerah, disusul kota-kota lain di Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Fauzi Bahar sebagai Walikota Kota Padang (2003-2013), peraturan daerah tentang kewajiban memakai muslimah dikeluarkan untuk pegawai negeri sipil dan siswa sekolah umum di Padang.

Jika anda melewati kota-kota di Sumatera Barat, hampir di sudut-sudut strategis kota anda akan menemukan *billboards* yang berisi pesan moral seperti: "*Jauhi Narkoba dan Maksiat*", "*Mari kita berantas Judi dan Togel*", "*Kebersihan sebagian dari iman*", "*Hargailah perempuan karena surga di bawah telapak kaki ibu*", "*Jauhi diri dari Narkoba, sayangi hidup. Iman dan Taqwa yes...! Narkoba No....!*", "*Takut bencana alam... jauhi segala perilaku yang berhubungan dengan Maksiat*", "*Hidup kita semakin cemerlang dan gemilang tanpa Narkoba..!*". Slogan berisi pesan moral biasanya diikuti dengan foto dari otoritas, mulai dari pejabat daerah, politisi, ulama dan tokoh adat. Penggunaan *billboard* marak seiring dengan pilkada langsung, *billboard* dianggap sarana media yang efektif untuk dapat dikenal oleh masyarakat.

Salah satu isu moral publik yang sering mendapat sorotan politisi terutama ketika mendekati local election yakni penolakan terhadap LGBT karena tidak sesuai dengan budaya Minangkabau. Meskipun sikap homofobia umum terjadi di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia perilaku ini diinstitutionalkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah yang menolak LGBT. Pada November 2018 ribuan warga Padang baru-baru ini mendukung inisiatif pemerintah daerah untuk "melawan kejahatan di kota mereka". Demonstrasi yang dihadiri oleh ribuan pendemo ini diinisiasi oleh Walikota Kota Padang, Mahyeldi. Mahyeldi merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera, partai yang beraliran konservatif- bisa dilihat dari upaya PKS menggolkan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dan penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (DW, 2021). Sejalan dengan ideologi PKS, Mahyeldi kerap menjadikan posisinya sebagai wali kota untuk melakukan program anti maksiat.

## 2. Konformitas dan *Social Affiliation*

Meskipun homoseksualitas, selain dari provinsi Aceh tidak ilegal di Indonesia, Offord, B., & Cantrell, L. (2001) berpendapat bahwa sikap resmi pemerintah Indonesia homoseksualitas adalah bahwa hal itu harus diperlakukan sebagai sesuatu yang ilegal. Data dari (BBC, 2018) menunjukkan ada 45 peraturan daerah di Indonesia yang menentang LGBT. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemerintah daerah harus mendasarkan kebijakan publik berdasarkan dengan identitas lokal. Identitas lokal ini secara khusus mengacu pada pepatah adat. Di Minangkabau, Sumatera Barat, posisi Syariah, yang disandingkan dengan adat, telah memainkan peran penting dalam masyarakat.

Von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K (2012) mengungkapkan bahwa adat dan Islam adalah tingkat tertinggi ideologi abstrak dengan banyak lapisan kerangka institusional yang tentu saja membutuhkan pemahaman filosofi yang mendalam, beratnya konsep identitas agama dan adat membuat tidak semua orang bisa memahami dengan mudah. Karenanya konsep ABS SBK seringkali hanya menjadi jargon, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan jelas. Dalam penjelasannya Simon (2012) menemukan bahwa konsep abstrak ABS SBK merupakan inti dari ideologi Minangkabau yang biasanya disingkat, ABS SBK, walaupun sering berdoa dan menjadi tameng dalam setiap argumentasi untuk menjelaskan politik moral yang dijalankan, sering kali ABS SBK sering kali tanpa penjelasan tentang kenapa dan bagaimana. Dalam keseharian ataupun wacana di media massa, jamak kita temui alasan mengapa sebuah kebijakan publik diambil berdasarkan ABS SBK. Selain *over general* penggunaan istilah ini juga melupakan identitas lain yang ada di Sumatera Barat dan anggapan bahwa mereka bukan dari bagian dari komunitas.

Orang Minang sendiri mengidentifikasi diri mereka dengan prinsip ABS SBK. Prinsip ini juga yang menjadi landasan politik moral. Dalam wawancara ketika peneliti mengungkapkan tentang penerapan ABS SBK sebagian besar informan (Minangkabau) yang berasal dari berbagai latar belakang mempunyai pandangan positif tentang ABS SBK dan yakin bahwa ini perlu diterapkan di Sumatera Barat.

Konformitas adalah bagian dari budaya Sumatera Barat. Simon (2012) berpendapat bahwa dengan konformitas inilah yang mengikat tradisi dan agama. Dorongan untuk menjadi Muslim yang baik bukan hanya berasal dari individu tapi disokong oleh masyarakat dan institusi. Indrizal, E., Kreager, P., & Schroeder-

Butterfill, E. (2009) mendukung pernyataan ini dengan penelitiannya yang memperlihatkan pemberlakuan seleksi moral penerima bantuan dari masjid, penerima bantuan diharapkan di tengah kemalangan hidupnya, ia merupakan seorang Muslim yang baik dan memegang teguh prinsip agama Islam. Mereka yang jauh dari kehidupan agama, akan sulit atau dipinggirkan untuk menerima bantuan. Pola ini dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) yang memberikan bantuan sembako kepada jemaah. Agar jamaah loyal dan mau mengikuti kajian yang mereka adakan.

Upaya saling mengingatkan jamak dilakukan di komunitas di Sumatera Barat. Misalnya saja Irsyad seorang pemilik toko handphone di Bukittinggi mengakut tak ragu langsung menegur jika menemukan perbuatan dan pemikiran yang dianggap berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran agama:

*“Salah satu karyawan saya gay, saya menasehatinya, saya mengajaknya sholat, dia melakukannya karena pengaruh teman-temannya. Menurut saya, menjadi LGBT adalah dosa terburuk terhadap murka Allah yang lebih buruk dari dosa lainnya, seperti miras dan zina. Saya tidak pernah melihat hewan dengan preferensi jenis kelamin yang sama”*

Pengawasan dan evaluasi bukan hanya datang dari mayoritas penegak aturan tapi juga dari *self-censorship*. Karena tinggal dan hidup di lingkungan dengan peraturan ketat karenanya muncul mekanisme *self-censorship* yang salah satunya adalah penghakiman atas diri sendiri karena merasa berbuat dosa. Amel-perempuan yang tinggal di Kota Padang sering menghabiskan waktunya di bar. Biasanya Amel minum-minum *hangout* di bar dengan teman-temannya di hari *weekend*. Lepas minum biasanya ia tak memilih pulang ke rumah, karena khawatir orang tuanya akan memarahinya melihat anak perempuannya *teler*.

Pandangan lingkungan tentang moralitas perempuan jilbab. Menurut Amel dalam beberapa kurun waktu terakhir semakin banyak ia temui ia bukan satu-satunya perempuan berjilbab yang minum di bar. Satu sisi berjilbab membuatnya malu untuk berjoget di klub, ia lebih memilih diam karena menurutnya tidak pantas perempuan berjilbab *joget-joget* di klub. Ketika wawancara Amel terus menyalahkan diri sendiri dan menganggap otaknya tidak berfungsi. Ia menyadari meminum alkohol melanggar ajaran agama, apalagi dilakukan oleh perempuan berhijab seperti dirinya. Sehabis minum, walaupun dalam keadaan tak sadar Amel berusaha tetap shalat dan meminta ampun atas kesalahannya.

Menurut Simon (2012), ikatan sosial yang kuat diikat dalam nuansa tradisi yang mengikat. Pada tahap ini kesalahan seorang muslim bukan hanya menjadi milik individu tapi dibentuk dan diikat oleh komunitas dimana religius ideologi bukan menjadi tujuan utama namun perwujudan sebagai manusia *shaleh* yang lebih diutamakan sehingga mendapat tempat utama di masyarakat. Simon menjelaskan argumentasinya bahwa ikatan kekerabatan yang kuat inilah yang menjadi faktor kuat dalam mendorong individu dibentuk dan dinilai lewat pandangan komunitas. Pandangan bahwa ketaatan bukan hanya menjadi milik individu namun harus disebar di masyarakat inilah yang mendorong komunitas untuk saling mengkoreksi, mengawasi dan mengingatkan.

Alkohol, seks pranikah, homoseksualitas dianggap tidak bermoral dan merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas. Sedangkan miras, judi dan

seks bebas menganggap hal-hal yang dilarang dalam Islam namun tetap dianggap salah. Minum alkohol (pajak alkohol) membawa pajak kepada pemerintah, prostitusi secara tidak langsung memberikan pendapatan di sektor perhotelan. Sedangkan prostitusi dan kegiatan LGBT tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah.

### 3. LGBT di Pusaran Politik Moral

Perspektif Barat tentang LGBT telah berubah secara signifikan selama dua puluh tahun. Williams, W. L (1993) seorang antropolog Amerika mengakui di awal karir akademiknya khawatir mengakui statusnya sebagai seorang gay, karena pada tahun 1970 dan 1980 an masih ada diskriminasi terhadap LGBT. Report dari *The Netherlands Institute for Social Research* (2011) mengungkapkan data penurunan populasi yang menentang LGBT sejak tahun 1970, dan hanya menyisakan angka 7% pada tahun 1980 yang menolak LGBT. Di Indonesia penelitian dari Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (2015) menampilkan data ada relasi antara interaksi dengan penerimaan masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan LGBT dalam pekerjaan maupun pernah bekerja sama atau pun menggunakan jasa LGBT tidak menolak keberadaan mereka.

Pengakuan sosial membutuhkan interaksi agar dapat dirasakan oleh masyarakat umum, Sementara itu, kurangnya informasi dan pengalaman tentang LGBT menimbulkan kecemasan moral, sebagian besar informasi berasal dari otoritas yang mengutuk dan menyalahkan LGBT sebagai menyimpang. Mengapa pandangan masyarakat bisa berubah? Laporan dari *Pew Research* (2013) menunjukkan interaksi individu dengan LGBT dan juga orang-orang terkenal mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT. Peran media juga diungkapkan oleh Santana turut memberikan *framing* tidak menguntungkan, bahkan ia menilai konten dari pasangan *queer* belum tentu memberikan kontribusi realitas pasangan *queer*:

*"Ada youtuber Indonesia, pasangan lesbian namanya Kimi and Chika. Tapi apa yang dia liatin ke publik itu potret yang agak kurang bener"*

Kehadiran gay di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru. Oetomo (2001) menjelaskan budaya Nusantara mengenal aktivitas percintaan antara laki-laki. Paparan Oetomo yang berusaha menggali sejarah homo seksualitas pada masa tradisional bukanlah menjadi landasan bahwa homo seksualitas diterima atau sesuatu yang normal di masyarakat tradisional. Sama halnya dengan keberadaan mereka pada masa modern ini, kehadirannya ada namun bukan berarti homoseksual menjadi hal yang normal. Anderson dalam pengantarnya di buku Oetomo menyebut walaupun hubungan antara laki dan laki memang ada ditemukan tetapi masyarakat pada masa itu menilai relasi ini sebagai kenakalan laki-laki, iseng belaka, menunjukkan ketidakseriusan. Berbeda dengan tren kekinian yang melihat LGBT bukan cuma keisengan belaka namun melibatkan perasaan emosional pelakunya.

Pelibatan perasaan ini juga yang membuat waria (transgender) lebih diterima, diterima dalam artian mereka bisa menyalurkan ekspresi mereka dan hidup di masyarakat, walaupun mereka merupakan kelompok yang juga rentan akan di bully dan diskriminasi. Namun gay dan lesbian di masyarakat konservatif seperti Sumatera Barat tidak bisa mengungkapkan jati dirinya tanpa adanya konsekuensi



sosial yang berujung kepada persekusi. Kasus penggerebekan oleh warga pada tahun 2019 berujung kepada pemecatan statusnya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dari Oetomo juga bisa dilihat laki-laki yang terlibat hubungan dengan laki-laki lain tetap menjalankan tradisi pernikahan dengan perempuan. Namun data dari Oetomo bisa menggambarkan praktik LGBT pada dasarnya bukanlah hasil westernisasi, argumen yang sering dilempar oleh kaum konservatif yang mencurigai LGBT dengan upaya barat yang ingin menghancurkan moralitas bangsa. Seiring perubahan politik dan menguatnya Islamisasi praktik relasi antara laki-laki berubah menjadi sesuatu yang tabu bahkan mendapat kecaman.

Sebagai seorang yang dididik dan besar di lingkungan konservatif saya bisa mengerti dan memahami ketakutan orang tua terhadap isu LGBT. Dogma bahwa kesalahan anak menjadi kesalahan orang tua bukan hanya akan mereka terima cemoohan dari komunitas namun juga lewat ceramah-ceramah agama bahwa dosa anak akan menjadi kesalahan orang tua juga karena dianggap salah mendidik anak mereka. Namun perlu juga kita mendengarkan suara LGBT tentang bagaimana pergulatan yang mereka alami. Salah satunya Santana:

*"Saya tidak takut dibuang, tapi yg lebih takut tuh bikin orang tua merasa gagal, Padahal bukan tentang mereka. Takut juga sama penghakiman orang sekitar terutama di sumbar. saya sudah mengalami perjalanan panjang sampai akhirnya bisa terima diri sendiri dan nggak merasa bersalah sama orientasi seksual. Saya rasa, rasa bersalah dan takut itu muncul karena tuntutan sosial, semua hal yg dibangun oleh "normal-nya" heteronormativitas. Saya sering mikir, kadang sampai nangis kalau sudah kepikiran keluarga, takut banget nanti abang tidak membolehkan ketemu anaknya lagi kalau tahu saya gay. Padahal, saya adik yg baik, anak yg baik, tante yg baik, manusia yg baik, saya punya hati yg baik dan rajin beribadah. Saya tidak pernah nyakitin orang. saya lebih milih sakit hati daripada menyakiti orang-orang. Tapi kenapa hanya karena orientasi seksual, banyak hal seolah jadi terancam"*

Sementara riset yang ada selama ini menyoal tentang implikasi politik moralitas dan di sisi berseberangan membahas tentang bahaya LGBT. Satu sisi saya memahami ketakutan masyarakat pada makhluk asing seperti LGBT ditambah lagi informasi yang banyak diterima oleh masyarakat berasal dari otoritas dengan informasi yang menghujat dan menyalahkan berlandaskan ajaran agama dan adat istiadat. Namun kita juga harus bersikap kritis kepada penggunaan politisasi moral terutama ketika digunakan untuk membubarkan masalah riil masyarakat kita, yaitu korupsi. Kahin (1999), peneliti yang banyak melakukan penelitian di Sumatera Barat, khawatir dengan meningkatnya angka korupsi di Sumatera Barat. Meski korupsi terjadi dalam skala nasional, Kahin mengkhawatirkan sistem politik yang membuat Sumbar tertinggal dibandingkan daerah lain. Menurut Kahin:

*"Sumatera Barat tidak lagi mengungguli daerah lain dalam kualitas pendidikan yang dinikmati anak-anaknya, dan masyarakatnya tidak lagi relatif terwakili dalam kehidupan intelektual dan politik Indonesia"*

Meskipun terlalu dini untuk menyimpulkan kaitan antara politisasi moral, sudah saatnya untuk mengalihkan perhatian pada isu-isu publik daripada isu-isu pribadi individu.

## E. KESIMPULAN

Setelah reformasi, kekuatan kelompok Islam semakin kuat terutama mendorong isu moralitas menjadi isu publik, kekuatan kelompok Islam ini tidak diimbangi dengan alternatif politik terutama dari kelompok liberal dan kelompok garis kiri. Support dari politisi menggunakan isu moralitas juga didukung konformitas di masyarakat. Perasaan takut berbeda dan identifikasi kelompok, menjadikan individu bersikap sesuai dengan norma masyarakat. Memperluas temuan dari dengan Parker (2013) yang menyatakan bahwa anak muda di Kota Padang memberikan persetujuan bagi pihak berwenang untuk mengatur konsep seksual mereka, temuan di artikel ini melihat walaupun konformitas mendorong individu untuk mempertanyakan tindakan mereka, namun hal ini tidak mendorong mereka melakukan perubahan. Dalam komunitas terbatas individu tetap mempertahankan keinginan mereka dengan tetap memasang batas-batas dan kewaspadaan tinggi agar aktivitas mereka tidak diketahui oleh keluarga.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W dan Kanegae, H. 2013. The Preliminary Study of The Role of Islamic Teaching in the Disaster Risk Reduction (A Qualitative Case Study of Banda Aceh, Indonesia). *Procedia Environmental Sciences*, 17. pp 918-927.
- Beckmann, F dan von Benda-Beckmann, K. 2012. Islamic Law in A Plural Context: The Struggle Over Inheritance Law in Colonial West Sumatra. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 55(4-5). pp 771-793.
- Center, P. R. 2013. *A Survey of LGBT Americans*. Washington DC: Pew Rese
- Cohen, S. 2011. *Folk Devils and Moral Panics*. London: Routledge.
- Detik News. 2021.2 Kali PKS Tolak Aturan Cegah Kekerasan Seksual. DW. <https://www.dw.com/id/2-kali-pks-tolak-aturan-cegah-kekerasan-seksual/a-59784154>, diakses pada 30 September 2022
- Dwiastono, Rivan. Perda Syariah di Indonesia: antara Kearifan Lokal, Politik Elektoral dan Ancaman terhadap Kebhinekaan. BBC. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>, diakses pada 15 Agustus 2018.
- Hadiz, V. R. 2018. Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4). pp 566-583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>.
- Hamayotsu, K. 2013. The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4). pp 658-677.
- Hoon, C. Y. 2004. Revisiting the Asian Values Argument Used by Asian Political Leaders and Its Validity. *Indonesian Quarterly*, 32(2). pp 154-174.

- Indrizal, E., Kreager, P., & Schroeder-Butterfill, E. 2009. The Structural Vulnerability of Older People in A Matrilineal Society: the Minangkabau of West Sumatra, Indonesia. *The Cultural Context of Aging: Worldwide Perspectives Praeger*. pp 383-94.
- Kahin, A. 1999. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Keuzenkamp, S. 2011. *Acceptance of Homosexuality in the Netherlands*.
- Kitley, P. 2008. Playboy Indonesia and the Media: Commerce and The Islamic Public Sphere on Trial in Indonesia. *South East Asia Research*, 16(1). pp 85-116.
- Listiorini, D., Asteria, et al. 2019. Moral Panics on LGBT Issues: Evidence from Indonesian TV Programme. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(3). pp 355-371.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. 2018. Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and The Politics of Accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3). pp 479-497.
- Oetomo, D. 2001. Gay Men in The Reformasi Era: Homophobic Violence Could be a by-Product of the New Openness. *Inside Indonesia*, 66. pp 11-12.
- Offord, B., & Cantrell, L. 2001. Homosexual Rights as Human Rights. *Gay and Lesbian Asia: Culture, Identity, Community*. pp 233.
- Parker, L. 2013. The Moral Panic about the Socializing of Young People in Minangkabau. *Wacana*, 15(1). pp 19-40.
- Parker, L. 2006. Islamic Veiling: Religious Devotion and Sexual Morality among Minangkabau Adolescent Girls in West Sumatra, Indonesia. *Asia Insights*, (2), 7.
- Perempuan, K. P., & Anak, P. 2015. Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. *Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia*.
- Simon, G. M. 2012. Conviction without being Convinced: Maintaining Islamic Certainty in Minangkabau, Indonesia. *Ethos*, 40(3). pp 237-257. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1352.2012.01256.x>.
- Simon, G. M. 2009. The Soul Freed of Cares? Islamic Prayer, Subjectivity, and the Contradictions of Moral Selfhood in Minangkabau, Indonesia. *American Ethnologist*, 36(2). pp 258-275. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2009.01134.x>.
- Taggart, P. 2002. *Populism and the Pathology of Representative Politics. In Democracies and the populist challenge*. London: Palgrave Macmillan.